



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Senin

Tanggal: 17 Oktober 2016

Halaman: 2

SELURUH FASILITAS NEGARA HARUS DILEPAS 23 Oktober, Batas Akhir Baliho Petahana

YOGYA (KR) - Panwas Pilwali Yogya melayangkan imbauan ke sejumlah instansi di tingkat Pemkot Yogya menyangkut alat peraga sosial (APS). Baliho yang bergambarkan petahana, yakni Haryadi Suyuti dan Imam Priyono, diberi batas terakhir hingga 23 Oktober 2016 untuk diturunkan.

Ketua Panwas Kota Yogya, Agus Muhammad Yasin, Minggu (16/10), mengaku surat imbauan tersebut mendapat respons positif dari Sekretariat Daerah Kota Yogya. Pekan lalu surat itu kami kirimkan ke beberapa instansi. Selang sehari, sekretariat daerah mengundang pertemuan guna koordinasi. Beberapa APS yang bergambar petahana juga langsung diturunkan," urainya.

ruh APS yang bergambar petahana sudah diturunkan. Dari sisi jumlah juga tidak terlalu banyak, yakni kurang dari sepuluh unit. Beberapa yang menunggu penurunan antara lain di Jembatan Kleringan serta daerah Wiroababan.

"Dua bakal pasangan calon yang keduanya petahana kan tinggal menunggu ditetapkan oleh KPU. Harapan kami, sehari sebelum ditetapkan pada 24 Oktober, sudah tidak ada APS bergambar petahana yang berdiri," imbuhnya.

Selain itu, pengawasan terhadap petahana usai ditetapkan oleh KPU juga akan berlanjut. Terutama menyangkut penggunaan fasilitas negara selama

Hanya, ada beberapa APS bergambar petahana yang dipasang oleh Pemda DIY maupun pemerintah pusat. Terutama yang berkaitan sosialisasi program keluarga berencana serta imbauan kesehatan. Terkait hal itu, sudah disepakati untuk ditindaklanjuti oleh instansi di tingkat kota guna dikoordinasikan dengan pemerintah di atasnya.

Agus optimis, sebelum 23 Oktober selu-

masa kampanye lantaran cuti di luar tanggungan negara. Panwas juga optimis, baik Haryadi Suyuti maupun Imam Priyono memiliki komitmen dalam menjalankan aturan.

Ketua KPU Kota Yogya, Wawan Budiyanto, menuturkan seluruh fasilitas negara memang harus dilepas begitu memasuki masa kampanye. Pasalnya, sehari sebelum masa kampanye pada 28 Oktober 2016, surat cuti sudah harus diserahkan ke KPU. "Fasilitas negara itu meliputi rumah dinas, kendaraan dinas maupun hak protokol. Implementasinya nanti Panwas yang akan mengawasi," ujarnya.

(Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005